



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

MENGAWAL RENCANA IMPOR BERAS INDONESIA

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Seminggu ini kita disajikan berita rencana impor beras oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) serta kisruh beda data cadangan beras antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bulog. Perbedaan data antarlembaga pemerintah seperti ini kerap terjadi, termasuk dalam hal perhitungan stok beras nasional yang berimplikasi langsung pada keputusan untuk mengimpor beras. Rencana impor beras tersebut tentu saja bertolak belakang dengan pencapaian Indonesia yang dalam 3 tahun terakhir mengalami surplus beras hingga diklaim mencapai swasembada beras.

Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan bahwa pada dasarnya tidak ada yang berbeda soal data beras yang digunakan Kementan, Bulog, atau bahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Namun, Bulog yang berorientasi pada pengamanan stok cadangan beras pemerintah (CBP) berasumsi bahwa jika merunut pada CBP saat ini sejumlah 426.573 ton dan tidak ada penyerapan baru, maka stok CBP tersisa 342.801 ton di penghujung tahun. Di satu sisi, Kementan menjamin dapat memenuhi kebutuhan Bulog untuk mencapai batas aman CBP di level 1,2 juta ton. Kementan berpendapat bahwa 600 ribu ton kebutuhan Bulog masih tersedia dari dalam negeri. Namun, di sisi lain Bulog mengklaim beras yang dinyatakan tersedia di lapangan hanya berkisar 100 ribu ton saja, meski Bulog sudah membeli beras dengan harga komersial, yaitu mencapai Rp10.200 per kg. Oleh karena itu, bulog mengusulkan untuk membuka opsi impor beras sebesar 500 ribu ton.

Kondisi penyediaan beras nasional sesungguhnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun sejak 2019 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras, sebenarnya surplus beras sejak 2018 terus mengalami penurunan secara konsisten. Pada 2018, surplus beras mencapai 4,37 juta ton, 2019 menurun menjadi 2,38 juta ton, 2020 menjadi 2,13 juta, dan 2021 menurun pesat menjadi 1,31 juta ton. Berkorelasi dengan hal itu, luas panen padi sejak 2018 terus mengalami penurunan dari 11.378 hektar (ha), 10.678 ha pada 2019, 10.657 ha pada 2020, dan 2021 10.412 ha. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) 24 Oktober lalu Komisi IV menyoroti kinerja Bulog melalui tren realisasi pengadaan beras dalam negeri oleh Bulog yang menurun setiap tahun. Penyerapan beras dalam negeri tahun 2018 bisa mencapai 1,4 juta ton, dan konsisten menurun pada 2019 menjadi 1,2 ton, hingga pada semester I tahun 2022 ini hanya sekitar 550 ribu ton.

Polemik ini perlu dijawab sesegera mungkin oleh pemerintah dan perlu dipersiapkan strategi agar hal ini tidak terulang kembali pada masa mendatang. Pengamat pertanian melalui beberapa media menyuarakan agar opsi impor beras menjadi opsi terakhir yang ditempuh oleh pemerintah. Bulog diarahkan untuk mengoptimalkan penyerapan produksi lokal. Ementara Kementan diminta untuk memastikan 600-800 ribu ton beras dalam negeri tersedia agar dapat diserap oleh Bulog. Namun, hingga per 29 November ini, pengadaan 600 ribu ton beras dalam negeri yang dijanjikan Kementan tidak menunjukkan tanda-tanda akan tercapai. Realisasi penyerapan oleh Bulog dalam sepekan ini hanya mencapai 26.500 ton saja.

Di tengah permasalahan ini, banyak kalangan menilai bahwa peran Bapanas belum menunjukkan performa yang baik dalam hal mengambil keputusan atas urusan cadangan pangan. Bapanas sejatinya merupakan pihak yang telah diamanatkan dalam hal menentukan besaran CBP dan menetapkan keputusan impor beras Indonesia. Bapanas ke depan harus mampu mengatasi masalah ini dengan mengalkulasikan secara akurat pengadaaan jangka panjang bertarget (PJPB) untuk pemasukan minimal di tahun berikutnya. PJPB dapat berjalan jika stok beras nasional di setiap institusi (rumah tangga hingga horeka) terpantau secara faktual dengan mengedepankan teknologi informasi satu data.

Disamping itu, fakta yang kurang menggembirakan terkait produktivitas beras yang terus menurun perlu dijawab oleh Kementan dalam menjaga status swasembada beras agar tetap berlangsung di tengah tantangan krisis pangan global. Optimalisasi perlu ditekankan pada produktivitas *food estate* yang masih jauh berada di bawah target 3 ton per hektar serta menjaga ketersediaan pupuk bagi petani. Selain itu, Bulog perlu memperbaiki mekanisme penyerapan produksi beras dalam negeri, tidak hanya dengan menerapkan fleksibilitas harga, tetapi juga membeli di waktu yang tepat sehingga terhindar dari kenaikan harga yang dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kenaikan harga menjelang natal dan tahun baru di tiap penghujung tahun.

Atensi DPR

Sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan bahwa tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan tersebut bisa disiapkan di Indonesia, Komisi IV DPR telah menjalankan fungsi pengawasannya terhadap permasalahan menipisnya cadangan beras nasional dengan menjadikan opsi impor beras yang diwacanakan oleh Bulog sebagai opsi terakhir. Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementan, Bulog, dan Bapanas, untuk mengonsolidasikan selisih data cadangan beras yang terjadi. Selanjutnya, sesuai dengan kewenangan masing-masing, Kementan perlu menjamin ketersediaan 600-800 ribu ton yang dijanjikan, sementara Bulog perlu meningkatkan penyerapan beras dalam negeri dengan mekanisme harga yang fleksibel (komersial) dalam menjaga CBP berada pada level aman. Dalam jangka panjang, Komisi IV DPR RI perlu mendorong pemerintah, terutama melalui Bapanas yang telah diamanatkan memiliki otoritas dalam menentukan besaran CBP dan menetapkan keputusan impor beras, agar lebih proaktif dan kalkulatif dalam mengambil kebijakan terkait stok pangan nasional.

Sumber

Bisnis Indonesia, 24 November 2022;

ekonomi.bisnis.com, 29 November 2022;

Kontan, 24 November 2022;

Media Indonesia, 24 & 28 November 2022;

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kementan, Bapanas, Bulog, PT. RNI, 24 November 2022; dan *Republika*, 24 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official



EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rasbin
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022